

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, N. N., Mulyani, S., dan Alfian, A. 2019. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Entitas Akuntansi (Edisi Pert.)*. Bandung: Penamedia Group.
- Amalia, F. R., dan Purbadharmaja, I. B. P. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal EP Unud*, 3(6): 257–264.
- Amrozi, A. I. 2016. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi*, 1(1): 1–12.
- Andayani, W. 2004. Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Empiris di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, 5(1).
- Andirfa, M., Basri, H., dan Majid, M. S. A. 2016. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(3): 30–38.
- Anggraeni, R., dan Kiswanto. 2018. The Effect Of The Completeness Of Financial Statements And Fiscal Stress On The Human Development Index Through The Regional Financial Performance. *Accounting Analysis Journal*, 7(2): 61–68.
- Antari, N. P. G. S., dan Sedana, I. B. P. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(2): 1080–1110.
- Anynda, N. S., dan Hermando, S. B. 2021. Pengaruh kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Ilmu dan riset akuntansi*, 9(10): 1–20.
- Aryani, P. R., dan Hari, K. K. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 24(2): 84–97.
- Badjra, I. B., Mustanda, I. K., dan Abundandt, N. 2017. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dan dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1): 29–40.
- Badrudin, dan Rudy. 2012. *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Chandra, D., Hidayat, S., dan Rosmeli, R. 2017. Dampak dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 12(2): 67–76.
- Cohen, S. 2008. Identifying the Moderator Factors of Financial Performance in Greek Municipalities. *Financial Accountability & Management*, 24(3): 265–294.
- Darwanis, D., dan Saputra, R. 2014. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 1(2): 183–199.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2022. Ringkasan APBD 2016-2020. *Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah*. Diambil Juni 2, 2022, dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- Effendi, S. 2021. *Akuntansi Keuangan SKPD/SKPKD (PPKD) Pemerintahan Daerah*. Batam: IKAPI.
- Fernandes, J., dan Putri, S. 2022. Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah pada 19 kabupaten/kota provinsi sumatera barat tahun 2017-2020. *Jurnal Revenue*, 3(1): 198–209.
- Fitra, H. 2019. *Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah (Edisi Pert.)*. Malang.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Diponegoro: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. 2002. *Akuntansi sektor publik akuntansi keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Heryanti, chrisna dwi, Wahidahwati, dan Suryono, B. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 3(1): 98–116.
- Holung, R. L., Kawung, G. M. V., dan Tumangkeng, S. 2021. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 9(1): 869–877.
- Jaeni, dan Anggana L, G. 2016. Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Propinsi Terhadap Belanja Modal. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 5(1): 13–26.
- Kawatu, F. S. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Manado: Deepublish.

- Leki, Y., T., N. A., dan I., S. J. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(5): 164–174.
- Locke, E. A. 1968. Toward a Theory of Task Motivation and Incentives. *Organizational Behavior and Human Performance*, 3(2): 157–189.
- Mahardika, I. G. N. S., dan Artini, L. G. S. 2014. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 3(3): 733–749.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. STIM YPKN.
- Mardiasmo. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2006). Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2007). Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Mulyani, S., dan Wibowo, H. 2017. Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015). *Kompartemen*, 15(2): 35–43.
- Nasution, D. A. D. 2019. *Akuntansi Sektor Publik (Mahir Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Daerah)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nugroho, F., dan Rohman, A. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1(2): 1–14.
- Nur'ainy, R., Desfitriana, dan Utomo, R. B. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kota Jawa Barat. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 5(7): 8–9.
- Nurhayati, N., dan Hamzah, A. 2020. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1): 22–34.
- Nurzen, M. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(4): 1–16.
- Oktaviani, M. A., dan Sari, D. P. 2020. Pengaruh Kemandirian Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. *E-Journal STIE AAS Surakarta*, 21(1): 186–193.

- Pratiwi, N. 2021. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangun Manusia Di Diy, 6(2): 180–188.
- Presiden Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (2000). Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. 2005a. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Presiden Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2005). Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Rahardja, P., dan Manurung, M. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi) (Ketiga)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Raharja, A. K. Y., Suharno, dan Harimurti, F. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus di Wilayah Soloraya Periode 2013 – 2015). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 13(1): 198 – 204.
- Sari, D. G. Y. A., Kepramareni, P., dan Novitasari, N. L. G. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali. *Jurnal Krisna*, 9(1): 15–29.
- Sari, I. P., Agusti, R., dan Rofika, R. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (studi pada Kab/Kota pulau Sumatra). *Jom Fekon*, 3(1): 679–692.
- Sari, N. M. D. P., dan Mustanda, I. K. 2019. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, 8(8): 4759–4787.
- Sari, N., Nainggolan, B. R. M., Purba, R. A., Saragih, T. B., dan Banjarnahor, W. 2020. Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 4(1): 219–223.
- Sekaran, U., dan Bougie, R. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis Buku 2 Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Septira, F., dan Prawira, I. F. A. 2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fiscal Stress. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 7(1): 57–64.
- Setiawan, P., Widiyanti, R., Siregar, L. M., Nurhaida, N., dan Oktavia, E. 2021. Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016. *Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7(1): 44–53.

- Suci, S. C., dan Asmara, A. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 3(1): 8–22.
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., dan Sofiati, N. A. 2017. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahar, A., dan Zakhya, M. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akutansi dan Investasi*, 12(1): 88–99.
- Tahir, I., Mas'ud, M., dan Plyriadi, A. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. *Jurnal Riset Bisnis*, 93(1): 66–74.
- Tolosang, K. D. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(3): 79–92.
- Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (2004). Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Wardani, P. R. O., dan Sutrisna, I. K. 2019. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan IPM Di Kawasan Metropolitan Sarbagita. *E-Jurnal EP Unud*, 8(6): 1361–1389.
- Wertianti, I. G. A. G., dan Dwirandra, A. A. N. B. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan Pad Dan Dau Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(3): 567–584.

L A M P I R A N

LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Teori

NO	Penulis/ Topik/ Judul Buku/ Artikel	Tujuan Penelitian/Penulisa n Buku/Artikel	Konsep/ Teori/ Hipotesis	Variabel Penelitian dan Teknik Analisis	Hasil Penelitian/ Isi Buku
1	Pengaruh Kemandirian Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Oktaviani, dkk. (2020)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kemandirian Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	<u>Teori/Konsep :</u> Teori keagenan adalah Hubungan antara principal dan agent dalam organisasi pemerintahan yaitu rakyat sebagai principal yang diwakili oleh DPRD, mempercayakan pengelolaan kekayaan daerah kepada pemerintah daerah sebagai agent yang bertugas mengelola dana principal sebagai agent kepemilikan informasi pemerintah daerah lebih banyak terkait	<u>Independen</u> 1. Kemandirian Keuangan Daerah, 2. Kinerja Keuangan Daerah, 3. Sistem Pengendalian Daerah. <u>Dependen</u> Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.	1. semakin tinggi kemandirian suatu daerah maka akuntabilitas pelaporan keuangan semakin meningkat 2. Semakin baik kinerja pemerintah maka akuntabilitas pelaporan keuangan semakin meningkat karena kinerja pemerintah yang baik akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat sehingga pemerintah daerah

			<p>pengelolaan keuangan daerah dibandingkan dengan rakyat sebagai principal.</p> <p><u>Hipotesis :</u></p> <p>H.1 Kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah</p> <p>H.2 Kinerja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan</p> <p>H.3 Sistem pengendalian berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan</p>		<p>mendapatkan dukungan dan kepercayaan dalam pengelolaan keuangan bahwa pemda menggunakan kekuasaan publik untuk membenarkan semua aktivitas publik yang dikelola oleh pemda untuk membangun daerah yang sesuai dengan harapan publik.</p>
2	Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui	<p><u>Teori/Konsep :</u></p> <p>Teori keagenan adalah Hubungan antara principal dan</p>	<u>Independen</u>	kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi secara simultan

	<p>Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di DIY. Pratiwi (2021)</p>	<p>pengaruh kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2014-2019, untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di</p>	<p>agent dalam organisasi pemerintahan</p> <p><u>Hipotesis:</u></p> <p>H.1 Pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.</p> <p>H.2 Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia</p>	<p>1. Kemandirian Keuangan Daerah,</p> <p>2. Pertumbuhan Ekonomi.</p> <p><u>Dependen</u></p> <p>Indeks Pembangunan Manusia</p>	<p>berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2014-2019, kemandirian keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2014-2019, dan pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2014-2019</p>
--	---	--	--	--	--

		Provinsi DIY tahun 2014-2019, untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi DIY tahun 2014-2019			
3	Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado Holung, dkk. (2021)	penelitian ini bertujuan untuk pengaruh kemandirian keuangan daerah, kinerja keuangan daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Di Kota	<u>Teori/Konsep :</u> Teori Agensi mengacu pada jenis hubungan keagenan di mana satu atau lebih (prinsipal) menyewa orang lain untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan wewenang pengambilan	<u>Independen</u> 1. Kemandirian Keuangan Daerah 2. Kinerja Keuangan Daerah 3. Belanja Modal, <u>Dependen</u>	Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang diajukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Kemandirian, Kinerja Keuangan dan Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di

		Manado secara parsial maupun simultan	keputusan tertentu kepada agen. <u>Hipotesis:</u> H.1 Terdapat pengaruh kemandirian keuangan daerah, kinerja keuangan daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Di Kota Manado H.2 Terdapat pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Di Kota Manado H.3 Terdapat pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Di Kota Manado.	Pertumbuhan Ekonomi	Kota Manado, kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado, kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado. Dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado.
--	--	---------------------------------------	---	---------------------	---

			H.4 Terdapat pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Di Kota Manado .		
4	Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ipm Di Kawasan Metropolitan Sarbagita. Wardani dkk. (2019)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis pengaruh kemandirian keuangan daerah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada kawasan metropolitan SARBAGITA, menganalisis pengaruh kemandirian keuangan daerah,	<u>Teori/Konsep:</u> Pertumbuhan.ekonomi dapat diartikan dengan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat.meningkat. <u>Hipotesis :</u> H.1 Pertumbuhan Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	<u>Independen</u> 1. Kemandirian Keuangan Daerah, 2. Investasi. <u>Dependen</u> 1. Pertumbuhan Ekonomi, 2. IPM.	Berdasarkan teori dan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif (signifikan) dan investasi berpengaruh positif (signifikan) terhadap pertumbuhan ekonomi, kemandirian keuangan daerah dan investasi tidak berpengaruh langsung terhadap IPM, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif (signifikan) terhadap IPM, kemandirian keuangan

		investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM pada kawasan metropolitan SARBAGITA, menganalisis pengaruh kemandirian keuangan daerah dan investasi melalui pertumbuhan ekonomi terhadap IPM pada kawasan metropolitan SARBAGITA	H.2 Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap IPM		daerah dan investasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi.
5	Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Bertujuan untuk dapat mengetahui menganalisis perkembangan kemandirian keuangan daerah	<u>Teori/Konsep:</u> Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan Output perkapita dalam jangka panjang dan	<u>Independen</u> Kemandirian Keuangan Daerah. <u>Dependen</u>	Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa kemandirian keuangan daerah mempunyai pengaruh positif secara

	Kabupaten/Kota Provinsi Banten Suci dkk (2014)	kabupaten dan kota di Provinsi Banten tahun 2001-2011 serta menganalisis pengaruh kemandirian keuangan daerah tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota Provinsi Banten.	pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari suatu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat <u>Hipotesis :</u> H.1 pengaruh Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	Pertumbuhan Ekonomi	signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Hasil penelitian menunjukkan rasio PAD berpengaruh positif secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Ketergantungan terhadap Dana Perimbangan akan berpengaruh terhadap penurunan perekonomian.
6	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh secara simultan dan parsial Pengaruh PAD dan belanja modal	<u>Teori/Konsep :</u> Artikel ini menjelaskan bagaimana Kinerja keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kinerja keuangan yang meliputi anggaran dan realisasi pendapatan asli	<u>Independen</u> 1. PAD 2. Belanja Modal <u>Dependen</u> 1. Kinerja Keuangan	Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (Y), belanja modal (X2) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan

	Leki dkk., (2018)	terhadap kinerja keuangan	<p>daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.</p> <p><u>Hipotesis :</u></p> <p>H1 : Diduga bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah</p> <p>H2 : Diduga bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah</p> <p>H3 : Diduga bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh positif</p>		<p>terhadap kinerja keuangan (Y), dan secara bersama-sama pendapatan asli daerah (X1) dan belanja modal (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (Y) di Kabupaten Halmahera Barat.</p>
--	-------------------	---------------------------	--	--	---

			terhadap kinerja keuangan daerah		
7	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Timur) Amrozi (2016)	Untuk menguji pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah dengan pendapatan asli daerah	<p><u>Teori/Konsep :</u></p> <p>Artikel ini menganalisis bagaimana Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan (rasio kemandirian), Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan (kemampuan mobilisasi daerah), Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap</p>	<p><u>Independen</u></p> <p>1. Belanja Modal</p> <p><u>Dependen</u></p> <p>1. Pertumbuhan Kinerja Keuangan</p> <p><u>Intervening</u></p> <p>1. PAD</p>	Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan (rasio kemandirian), Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan (kemampuan mobilisasi daerah), Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara <i>negative</i> dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan (efisiensi

			<p>pertumbuhan kinerja keuangan (efisiensi pengeluaran anggaran), Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan (sisa pengeluaran anggaran), Belanja Modal secara signifikan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap pertumbuhan kinerja keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening.</p> <p><u>Hipotesis:</u></p> <p>H1 :Belanja modal mempunyai pengaruh terhadap PAD</p> <p>H2 :PAD mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah</p> <p>H3 :Belanja modal mempunyai pengaruh terhadap</p>		<p>pengeluaran anggaran), Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan (sisa pengeluaran anggaran), Belanja Modal secara signifikan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap pertumbuhan kinerja keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening.</p>
--	--	--	---	--	---

			pertumbuhan kinerja keuangan daerah		
8	Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapata Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh. Andirfa dkk. (2016)	Untuk mengetahui hubungan PAD,dana perimbangan dan kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah.	<p><u>Teori/Konsep:</u> Anggaran publik ini menjelaskan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai pada periode tertentu dinyatakan dalam ukuran finansial.</p> <p>Hipotesis: H.1 Belanja modal mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah H.2 Dana perimbangan mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. H.3 PAD mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah</p>	<p><u>Independen</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Modal, 2. Dana Perimbangan 3. PAD <p><u>Dependen</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Keuangan 	Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun hasil pengujian secara parsial menunjukkan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh <i>negative</i> terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.

9	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Antari dkk. (2018)	Untuk mengetahui signifikansi pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	<p><u>Teori/Konsep:</u></p> <p>Teoritis yang didapatkan dari penelitian ini yaitu diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>Hipotesis:</p> <p>H1 :PAD mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>H2 :Belanja modal mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>	<p><u>Independen</u></p> <p>1.PAD 2.Belanja Modal</p> <p><u>Dependen</u></p> <p>1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p>	Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
10	Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental revenue Dan	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh belanja modal, intergovernmental	<p><u>Teori/Konsep:</u></p> <p>1. Teori Keagenan (Agency Theory) Dalam hubungan keagenan, terdapat dua pihak yang melakukan</p>	<p><u>Independen</u></p> <p>1. Belanja Modal 2. Intergovernmental Revenue</p>	Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh

	<p>Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015) Mulyani dkk. (2017)</p>	<p>revenue, ukuran pemerintah daerah dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan.</p>	<p>keepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan wewenang atau kekuasaan (prinsipal) dan yang menerima kewenangan (agen)</p> <p>2. Teori kontingensi Pendekatan kontijensi pada akuntansi didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem akuntansi secara universal selalu tepat untuk bisa diterapkan pada seluruh organisasi dalam setiap keadaan, tetapi dipengaruhi juga oleh faktor-faktor situasional yang ada dalam organisasi.</p> <p>Hipotesis: H1 : Belanja modal berpengaruh negatif</p>	<p>3. Ukuran Pemerintah daerah 4. Pendapatan asli daerah</p> <p><u>Dependen</u> 1. kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efisiensi</p>	<p>negatif signifikan belanja modal, ukuran pemerintah daerah, intergovernmental revenue dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan sebagai berikut, belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2015. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2015. Intergovernmental revenue berpengaruh negatif</p>
--	--	--	---	--	--

			<p>signifikan terhadap kinerja keuangan</p> <p>H2 : Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>H3 : Intergovernmental Revenue berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan</p> <p>H4 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p>		<p>signifikan terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2015. Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2015. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelayanan publik dan kinerja pemerintahan daerah khususnya dari belanja modal, ukuran pemerintah daerah, intergovernmental revenue dan pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun amatan 2012-2015.</p>
--	--	--	---	--	---

11	<p>Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kab/Kota Pulau Sumatra) Sari dkk. (2016)</p>	<p>Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menguji dan membuktikan pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 2. menguji dan membuktikan pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 3. menguji dan membuktikan pengaruh 	<p>Hipotesis:</p> <p>H1 :Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>H2 :PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>H3 :Leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>H4 :Dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>H5 :Ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>	<p>Independen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran Pemerintah Daerah 2. PAD 3. Leverage 4. Dana Perimbangan 5. Ukuran Legislatif <p>Dependen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja keuangan daerah 	<p>Berdasarkan hasil dari analisis tersebut maka dapat disimpulkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari t hitung (2,513) > t tabel (2,008) dengan pvalue (0,015) < α (0,05). 2. PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat darinilai t hitung (2,182) > t tabel (2,008) dengan pvalue (0,034) < α (0,05). 3. Leverage tidak berpengaruh terhadap
----	--	---	--	--	---

		<p>leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>4. menguji dan membuktikan pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>5. menguji dan membuktikan pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>			<p>kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung (1,740) < t tabel (2,008) dengan pvalue (0,087) > α (0,05).</p> <p>4. Dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung (4,060) > t tabel (2,008) dengan pvalue (0,000) < α (0,05). 5. Ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung (0,044) < t tabel (2,008) dengan p value (0,965) > α (0,05).</p>
--	--	---	--	--	---

12	<p>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Wilayah Soloraya Periode 2013 – 2015) Krisna dkk. (2016)</p>	<p>Bertujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk menganalisis signifikansi pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Soloraya. 2. untuk menganalisis signifikansi pengangguran terhadap kinerja keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Soloraya. 3. untuk menganalisis 	<p>Hipotesis</p> <p>H1 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.</p> <p>H2 : Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.</p> <p>H3 : Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.</p> <p>H4 : Pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan</p>	<p>Independen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pertumbuhan ekonomi 2. Pengangguran 3. Kemiskinan <p>Dependen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja keuangan 	<p>Berdasarkan hasil dari analisis tersebut maka dapat disimpulkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 2. pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 3. kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
----	---	---	--	--	---

		<p>signifikansi kemiskinan terhadap kinerja keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Soloraya.</p> <p>4. untuk menganalisis signifikansi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan secara simultan terhadap kinerja keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Soloraya.</p>	<p>terhadap kinerja keuangan daerah</p>		
--	--	--	---	--	--

13	<p>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Nurhayati dkk. (2020)</p>	<p>The purpose of this research is to determine the effect of Economic Growth and Size of Local Government on Financial Performance of Regional Governments This research used secondary data The population of this research is Budget Realization Report, Balance Sheet and Report on the realization PDRB of District / City Government in West Java period 2014-2018.</p>	<p>Hipotesis :</p> <p>H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>H2 : Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah</p>	<p>Independen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pertumbuhan ekonomi 2. ukuran pemerintah <p>dependen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kinerja keuangan 	<p>Berdasarkan hasil dari analisis tersebut maka dapat disimpulkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 2. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 3. Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
----	--	---	--	--	---

14	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur heryanti dkk., (2019)	Tujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota provinsi Jawa Timur.	Hipotesis H1 :Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. H2 :Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. H3 :Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	Independen 1. PAD 2. Dana perimbangan 3. Pertumbuhan ekonomi Dependen 1. Kinerja keuangan	Berdasarkan hasil dari analisis tersebut maka dapat disimpulkan : 1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah 2. Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah 3. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah 4. Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap
----	--	---	--	--	---

					kinerja keuangan pemerintah
15	Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah Dan Bantuan Propinsi Terhadap Belanja Modal Jaeni dkk. (2016)	Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bantuan Propinsi yang di moderasi Pertumbuhan Ekonomi terhadap alokasi Belanja Modal.	Hipotesis: H1 : PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. H2 : Bantuan Propinsi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal H3 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal H4 : Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh PAD terhadap Belanja Modal.	Independen 1. PAD 2. Bantuan Propinsi Dependen 1. Belanja Modal Moderasi 1. Pertumbuhan Ekonomi	Berdasarkan hasil dari analisis tersebut maka dapat disimpulkan : Bahwa ternyata Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Bantuan keuangan Propinsi juga berpengaruh terhadap Belanja Modal. Demikian juga Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dan Pertumbuhan Ekonomi terbukti memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah

					<p>Propinsi Jawa Tengah meningkat walaupun relatif sehingga masih tergantung juga bantuan dari Pemerintah Propinsi sehingga pemerintah daerah mulai memiliki kemandirian yang mulai tumbuh. Penelitian ini menunjukkan model tersebut mampu menjelaskan variance Belanja Modal sebesar 85,5 %. Selanjutnya sebesar 14,5% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak masuk dalam model tersebut</p>
--	--	--	--	--	--

Lampiran 2. Tinjauan Empiris Penelitian

No	Penulis	Judul	Hasil
1	(Maltide dkk.,2020)	Pengaruh Kemandirian Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi kemandirian suatu daerah maka akuntabilitas pelaporan keuangan semakin meningkat. Semakin baik kinerja pemerintah maka akuntabilitas pelaporan keuangan semakin meningkat karena kinerja pemerintah yang baik akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat sehingga pemerintah daerah mendapatkan dukungan dan kepercayaan dalam pengelolaan keuangan bahwa penda menggunakan kekuasaan publik untuk membenarkan semua aktivitas publik yang dikelola oleh penda untuk membangun daerah yang sesuai dengan harapan.
2	(Pratiwi 2021)	Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di DIY	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2014-2019, kemandirian keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2014-2019, dan

			pertumbuhan ekonomi secara par-sial berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabu-paten/Kota di Provinsi DIY tahun 2014-2019.
3	(Rodrik o dkk., 2021)	Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Kemandirian, Kinerja Keuangan dan Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado, kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado, kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado. Dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado.
4	(Septira dkk. 2019)(Sutrisna dkk., 2019)	Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ipm Di Kawasan Metropolitan Sarbagita.	Berdasarkan teori dan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif (signifikan) dan investasi berpengaruh positif (signifikan) terhadap pertumbuhan ekonomi, kemandirian keuangan daerah dan investasi tidak berpengaruh langsung terhadap IPM, sedangkan pertumbuhan ekonomi

			berpengaruh positif (signifikan) terhadap IPM, kemandirian keuangan daerah dan investasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi.
5	(Asmaradkk., 2014)	Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten.	Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa kemandirian keuangan daerah mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Hasil penelitian menunjukkan rasio PAD berpengaruh positif secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Ketergantungan terhadap Dana Perimbangan akan berpengaruh terhadap penurunan perekonomian.
6	(Lekidkk., 2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	Hasil analisis regresi menunjukan bahwa pendapatan asli daerah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (Y), belanja modal (X2) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (Y), dan secara bersama-sama pendapatan asli daerah (X1) dan belanja modal (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

			keuangan (Y) di Kabupaten Halmahera Barat.
7	(Amrozi, 2016)	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Timur)	Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan (rasio kemandirian), Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan (kemampuan mobilisasi daerah), Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara negative dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan (efisiensi pengeluaran anggaran), Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan (sisa pengeluaran anggaran), Belanja Modal secara signifikan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap pertumbuhan kinerja keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening.
8	(Andirfa dkk. 2016)	Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapata Asli Daerah Terhadap Kinerja	Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh

		Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh.	terhadap kinerja keuangan. Namun hasil pengujian secara parsial menunjukkan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.
9	(Antari dkk., 2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
10	(Mulyani dkk., 2017)	Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015)	Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh negatif signifikan belanja modal, ukuran pemerintah daerah, intergovernmental revenue dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan

			<p>sebagai berikut, belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2015. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2015. Intergovernmental revenue berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2015. Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2015. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelayanan publik dan kinerja pemerintahan daerah khususnya dari belanja modal, ukuran pemerintah daerah, intergovernmental revenue dan pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun amatan 2012-2015.</p>
11	(Sari dkk. 2016)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran	<p>Berdasarkan hasil dari analisis tersebut maka dapat disimpulkan :</p> <p>5. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja</p>

		Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kab/Kota Pulau Sumatra)	<p>keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari t hitung (2,513) > t tabel (2,008) dengan pvalue (0,015) < α (0,05).</p> <p>6. PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung (2,182) > t tabel (2,008) dengan pvalue (0,034) < α (0,05).</p> <p>7. Leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung (1,740) < t tabel (2,008) dengan pvalue (0,087) > α (0,05).</p> <p>8. Dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung (4,060) > t tabel (2,008) dengan pvalue (0,000) < α (0,05).</p> <p>5. Ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung (0,044) < t tabel (2,008) dengan p value (0,965) > α (0,05).</p>
12	(Raharja dkk. 2017)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap	Berdasarkan hasil dari analisis tersebut maka dapat disimpulkan:

		Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Wilayah Soloraya Periode 2013 – 2015)	<ol style="list-style-type: none"> 1. pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 2. pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 3. kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
13	(Nurhayati dkk. 2020)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	<p>Berdasarkan hasil dari analisis tersebut maka dapat disimpulkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 2. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 3. Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
14	Heryanti dkk. (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja	<p>Berdasarkan hasil dari analisis tersebut maka dapat disimpulkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan

		Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur	<p>terhadap kinerja keuangan pemerintah</p> <p>2. Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah</p> <p>3. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah</p> <p>4. Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah</p>
15	(Jaeni dkk. 2016)	Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah Dan Bantuan Propinsi Terhadap Belanja Modal	<p>Berdasarkan hasil dari analisis tersebut maka dapat disimpulkan : Bahwa ternyata Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal Bantuan keuangan Propinsi juga berpengaruh terhadap Belanja Modal. Demikian juga Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dan Pertumbuhan Ekonomi terbukti memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah Propinsi Jawa Tengah meningkat walaupun relatif sehingga masih tergantung juga bantuan dari Pemerintah Propinsi sehingga pemerintah daerah mulai memiliki kemandirian yang</p>

			mulai tumbuh. Penelitian ini menunjukkan model tersebut mampu menjelaskan variance Belanja Modal sebesar 85,5 %. Selanjutnya sebesar 14,5% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak masuk dalam model tersebut
--	--	--	--

Lampiran 3. Validasi Ijin Penelitian



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 10, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3866120,
 FAKSIMILE (021) 3866120; LAMAN WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-246/PK.1/2022 26 September 2022
 Sifat : Sangat Segera
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Tanggapan Permintaan Informasi Publik a.n. Sdr. Mahardika Burhan Nomor Pendaftaran REG-133/PPID.PK/2022

Yth. Sdr. Mahardika Burhan
 Jl. Messang Bau Massepe No.12, Kampung Pisang, Kota Parepare

Sehubungan dengan permintaan informasi publik yang Saudara sampaikan kepada PPID Tingkat I DJPK melalui *email* ppid.djpk@kemenkeu.go.id pada tanggal 22 September 2022 dengan nomor pendaftaran REG-133/PPID.PK/2022, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Permintaan data yang Saudara ajukan berupa "Realisasi APBD Sulawesi Selatan Tahun 2016 sampai 2020".
2. Berkenaan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa data Realisasi APBD Sulawesi Selatan Tahun 2016 sampai 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diakses pada *website* DJPK pada tautan <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412> dengan memilih kolom "Tahun", Status Data "Realisasi", Jenis Data "Ringkasan". Data yang tersedia merupakan data terakhir yang tersedia di DJPK sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh masing-masing pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang diimplementasikan secara penuh sejak tahun 2016.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal



Ditandatangani secara elektronik
 Mariatul Aini





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 10, JALAN DR.WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON ((021) 3866120/Dering DJPK 1500420; FAKSIMILE (021) 3866120; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permintaan Informasi pada tanggal 22 September 2022 dengan nomor pendaftaran REG-133/PPID.PK/2022, kami menyampaikan kepada Saudara/i:

Nama : Mahardika Burhan
Alamat : Jl. Messang Bau Massepe No.12, Kampung Pisang, Kota Parepare
No. Telp/Email : 085398844110/ burhanm20a@student.unhas.ac.id

Pemberitahuan sebagai berikut:

A. Informasi Dapat Diberikan:

No.	Hal-Hal terkait Informasi Publik	Keterangan	
1.	Penguasaan Informasi Publik**	<input checked="" type="checkbox"/> Kami (sebagian /seluruhnya)*** <input type="checkbox"/> Badan Publik lain,	
2.	Bentuk fisik yang tersedia**	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Softcopy</i> (termasuk rekaman). <input type="checkbox"/> <i>Hardcopy</i> /salinan tertulis.	
3.	Biaya yang dibutuhkan****	<input type="checkbox"/> Penyalinan	Rp. ... x ... (jumlah lembaran) = Rp. ...
		<input type="checkbox"/> Pengiriman	Rp. ...
		<input type="checkbox"/> Lain-lain	Rp. ...
		Jumlah	Rp. ...
4.	Waktu Penyediaan	1 hari	
5.	Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon***** (tambahkan kertas bila perlu)	

B. Informasi Tidak Dapat Diberikan karena:**

- Informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan
 Informasi yang diminta belum dikuasai
 Informasi yang diminta belum didokumentasikan

Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu
*****

Jakarta, 22 September 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Tingkat I DJPK,



Ditandatangani secara elektronik
Mariatul Aini

Keterangan

- * Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permintaan.
 ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√).
 *** Coret yang tidak perlu
 **** Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.
 ***** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.
 ***** Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.



**Tanggapan Atas Permintaan Informasi Publik a.n. Mahardika Burhan
Nomor Pendaftaran REG-133/PPID.PK/2022**

Berkenaan dengan informasi publik yang Saudara ajukan kepada PPID Tingkat I DJPK pada tanggal 22 September 2022, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam permintaan informasi publik tersebut, kutipan permintaan informasi yang Saudara minta tertulis:
"Realisasi APBD Sulawesi Selatan Tahun 2016 sampai 2020".
2. Atas permintaan informasi publik Saudara tersebut di atas, terlampir kami sampaikan bahwa data Realisasi APBD Sulawesi Selatan Tahun 2016 sampai 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diakses pada *website* DJPK pada tautan <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412> dengan memilih kolom "Tahun", Status Data "Realisasi", Jenis Data "Ringkasan". Data yang tersedia merupakan data terakhir yang tersedia di DJPK sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh masing-masing pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang diimplementasikan secara penuh sejak tahun 2016.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Catatan:
Segala akibat hukum dari perlakuan data/informasi ini setelah keluar dari kantor Kementerian Keuangan, menjadi tanggung jawab Pemohon/peminta data.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar 90245
Telpon : (041 1) 585 415, 583 678 Telpon Fax : (041 1) 587218
<http://feb.unhas.ac.id> email : feb@unhas.ac.id

Nomor : 7668/UN4.4.1/PT.01.04/2022
Perihal : **Izin Penelitian.**

Makassar, 23 Agustus 2022

Kepada

Yth : Sekretaris Direktorat jenderal Perimbangan Keuangan
di-
tempat

Dengan hormat, disampaikan bahwa dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa Program Magister (Penyusunan Tesis), yang tersebut dibawah ini:

Nama : Mahardika Burhan
NIM. : A062201011
Jenjang Pendidikan : Magister (S2).
Program Studi : Magister Akuntansi

Akan mengadakan penelitian guna mendukung penulisan tesis yang berjudul :

**Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Belanja modal terhadap Kinerja Keuangan dengan
Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan).**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kiranya mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian dan pengambilan data.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Dr. Mursalin Nohong, SE., M.Si.
NIP. 197106192000031001

Tembusan Kepada Yth :

1. Dekan FEB UNHAS "sebagai laporan".
2. Peringgal.

Lampiran 4. Tabulasi Data

KAB/ KOTA	Kemandirian Keuangan (KK) (%)	Belanja Modal (BM) (%)	Kinerja Keuangan (KK1) (%)	Pertumbuhan Ekonomi (PE)
Kab. Bantaeng	0,076	1,34	0,605	34,130
Kab. Barru	0,103	1,249	0,538	31,750
Kab. Bone	0,117	1,031	0,422	35,150
Kab. Bulukumba	0,112	0,92	0,624	26,060
Kab. Enrekang	0,068	0,938		29,220
Kab. Gowa	0,153	1,176	0,484	21,040
Kab. Jeneponto	0,08	1,083	0,555	21,940
Kab. Luwu	0,096	0,962		33,550
Kab. Luwu Utara	0,159	0,998	0,592	32,020
Kab. Maros	0,155	1,166	0,596	52,090
Kab. Pangkajene dan Kepulauan	0,14	1,197	0	62,920
Kota Palopo	0,166	1,041	0,631	34,040
Kab. Luwu Timur	0,197	0,865	0,422	61,720
Kab. Pinrang	0,11	0,969		39,780
Kab. Sinjai	0,084	1,146		34,610
Kab. Kepulauan Selayar	0,057	0,984	0,46	35,460
Kab. Sidenreng Rappang	0,101	0,871	0,538	36,660
Kab. Soppeng	0,09	1,236	0,586	34,890
Kab. Takalar	0,102	1,474		26,730
Kab. Tana Toraja	0,135	0,698		23,720
Kab. Wajo	0,114	1,153		41,940
Kota Parepare	0,187	0,846		39,350
Kota Makassar		0,818	0,562	87,130
Kab. Toraja Utara		1,012	0,547	29,910
Kab. Bantaeng	0,101	0,941	0,422	37,410
Kab. Barru	0,162		0,501	34,510
Kab. Bone	0,185	1,369	0,592	39,040
Kab. Bulukumba	0,19	1,318	0,634	29,030
Kab. Enrekang	0,13	1,142	0,538	31,280
Kab. Gowa	0,206	1,282	0,605	22,980

Kab. Jeneponto	0,113	0,836	0,637	23,940
Kab. Luwu	0,121	1,041	0,501	36,560
Kab. Luwu Utara	0,12	1,028	0,569	35,020
Kab. Maros	0,216	1,194	0,562	56,120
Kab. Pangkajene dan Kepulauan	0,161	1,144	0,555	67,600
Kota Palopo	0,236	1,089	0,596	36,830
Kab. Luwu Timur		1,073	0,609	63,710
Kab. Pinrang	0,129		0,422	43,950
Kab. Sinjai	0,132	1,215	0,555	37,890
Kab. Kepulauan Selayar	0,109	0,969	0,601	39,270
Kab. Sidenreng Rappang	0,147	0,913	0,484	40,240
Kab. Soppeng	0,136		0,501	39,190
Kab. Takalar	0,135		0,569	29,210
Kab. Tana Toraja	0,192	1,396	0,645	26,150
Kab. Wajo	0,16	1,071	0,516	45,080
Kota Parepare	0,208	0,872		42,880
Kota Makassar		0,877	0,501	95,670
Kab. Toraja Utara	0,062	0,429	0,422	33,800
Kab. Bantaeng	0,131	0,743	0,46	41,630
Kab. Barru	0,143	0,975	0,586	38,090
Kab. Bone	0,138	1,047	0,501	43,870
Kab. Bulukumba	0,131	0,864	0,569	31,550
Kab. Enrekang	0,085	0,849	0,501	32,810
Kab. Gowa	0,176	1,046	0,581	25,070
Kab. Jeneponto	0,098	0,871	0,575	26,030
Kab. Luwu	0,116	0,995	0,516	40,200
Kab. Luwu Utara	0,122	0,932	0,501	38,650
Kab. Maros	0,222	0,921	0,592	60,920
Kab. Pangkajene dan Kepulauan	0,169	1,096	0,569	71,980
Kota Palopo	0,183	1,041	0,555	40,320
Kab. Luwu Timur	0,303	0,818	0,617	69,410
Kab. Pinrang	0,136	1,484	0,627	48,290
Kab. Sinjai	0,11	0,995	0,484	41,880
Kab. Kepulauan Selayar	0,109		0,596	43,620

Kab. Sidenreng Rappang	0,127	0,712	0,484	43,250
Kab. Soppeng	0,148	1,122	0,46	44,120
Kab. Takalar	0,144	0,952	0,637	31,510
Kab. Tana Toraja	0,153	0,877	0,642	29,310
Kab. Wajo	0,16		0,501	47,150
Kota Parepare	0,224	0,811	0,601	45,940
Kota Makassar		0,859	0,501	106,230
Kab. Toraja Utara	0,066	0,793	0,484	37,840
Kab. Bantaeng	0,132	0,867	0,516	46,840
Kab. Barru	0,148	1,092	0,627	41,800
Kab. Bone	0,144	1,141	0,64	47,810
Kab. Bulukumba	0,157	1,057	0,581	33,960
Kab. Enrekang	0,094	0,899	0,547	35,280
Kab. Gowa	0,189	1,005	0,422	27,500
Kab. Jeneponto	0,099	0,911	0,46	27,740
Kab. Luwu	0,109	1,007	0,562	43,040
Kab. Luwu Utara	0,139	0,938	0,501	41,650
Kab. Maros	0,254	1,036	0,609	64,600
Kab. Pangkajene dan Kepulauan	0,183	1,044	0,575	77,680
Kota Palopo	0,214	0,9	0,581	43,790
Kab. Luwu Timur		0,844	0,46	71,340
Kab. Pinrang	0,137	1,27	0,484	52,100
Kab. Sinjai	0,107		0,528	45,050
Kab. Kepulauan Selayar	0,093	0,969	0,501	47,990
Kab. Sidenreng Rappang	0,125	0,99	0,516	46,490
Kab. Soppeng	0,154	1,14	0,569	47,830
Kab. Takalar	0,123	1,023	0,538	34,420
Kab. Tana Toraja	0,147	0,897	0,538	31,660
Kab. Wajo	0,132	1,232	0,538	49,310
Kota Parepare	0,214	1,167	0,613	50,060
Kota Makassar		0,787	0,501	117,300
Kab. Toraja Utara	0,08	0,984	0,484	41,080
Kab. Bantaeng	0,164	0,746	0,422	45,680
Kab. Barru	0,157	0,792	0,501	40,360

Kab. Bone	0,188	1,068	0,613	45,680
Kab. Bulukumba	0,171	0,96	0,613	33,340
Kab. Enrekang	0,108	0,985	0	33,540
Kab. Gowa	0,198	0,846	0	28,200
Kab. Jeneponto	0,124	1,274	0,501	25,700
Kab. Luwu	0,131	0,875	0,575	43,910
Kab. Luwu Utara	0,126	0,643	0,516	41,070
Kab. Maros	0,248	0,991	0,64	47,730
Kab. Pangkajene dan Kepulauan	0,199	0,881	0,501	74,380
Kota Palopo	0,252	0,624	0,575	43,660
Kab. Luwu Timur		0,792	0,605	72,850
Kab. Pinrang	0,141		0,501	49,840
Kab. Sinjai	0,111	0,848		43,740
Kab. Kepulauan Selayar	0,087		0,575	46,730
Kab. Sidenreng Rappang	0,161	0,749	0,422	44,120
Kab. Soppeng	0,178	1,162	0,621	48,420
Kab. Takalar	0,165			34,030
Kab. Tana Toraja	0,146	1,014	0,516	27,100
Kab. Wajo	0,146	0,742	0,516	52,160
Kota Parepare	0,29	1,015	0,501	48,500
Kota Makassar			0,575	125,320
Kab. Toraja Utara	0,082	0,904	0,501	37,370